



Buletin Parlementaria

Nomor 1064/I/VIII/2019 • Agustus 2019



4TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-AS



4 BAKTI Diharapkan Fokus
Kembangkan Infrastruktur
Telekomunikasi

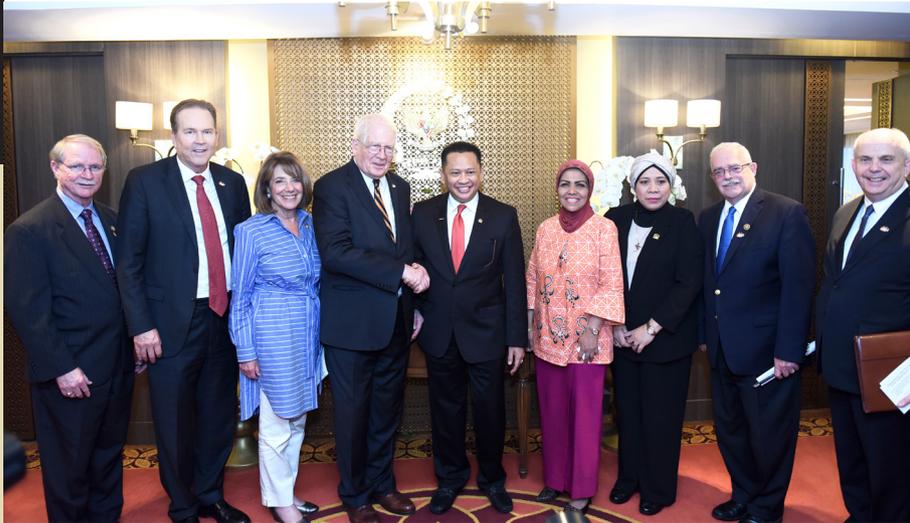


11 Kendalikan Kerusakan
Lingkungan dengan
Kontrol Perizinan



9 772614 339005

DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-AS



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Delegasi HDP Kongres AS. Foto: Jaka/OD

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, peran Parlemen Indonesia dan Amerika Serikat sangat besar dalam mendorong pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Karenanya DPR RI menyambut positif keterlibatan investor AS dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, pada kuartal ke-3 tahun 2018 lalu tercatat sebesar 356,04 juta dollar AS yang tersebar di 191 proyek.

“Dengan nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2018 mencapai 28,615 miliar dollar AS, masih banyak potensi perdagangan yang bisa dikembangkan,” tuturnya dalam pertemuan DPR RI dengan delegasi House Democratic Partnership (HDP) Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Anggota Kongres Amerika Serikat David Price, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).

Terkait isu militer dan pertahanan, politisi Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsuet ini memandang AS

merupakan mitra strategis dalam modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang tertuang dalam Minimum Essential Forces (MEF) yang merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan untuk dicapai di tahun 2024.

Bamsuet menambahkan, DPR RI berharap dengan disahkannya National Defense Authorization Act (NDAA) oleh Senat Amerika pada Juni 2019 lalu dan *Countering America's Adversaries through Sanction Act (CAATSA)* pada Agustus 2017, tidak mempengaruhi hubungan pertahanan dan keamanan Indonesia dan AS, khususnya dalam hal pengadaan senjata.

“Tahun 2018 Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak (imbal beli) 11 unit pesawat tempur Sukhoi (SU 35). Pengadaan pesawat tempur tersebut kami pandang sangat penting untuk keperluan pertahanan Indonesia dan juga untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kami berharap, kerja sama pengadaan alat pertahanan juga dapat dilakukan dengan Amerika

Serikat,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Tak hanya itu, Bamsuet menambahkan, Parlemen Indonesia dan Amerika Serikat perlu memperluas cakupan kerja sama tidak hanya dalam aspek pemajuan perdagangan dan demokrasi saja, tetapi juga dalam penguatan legislasi untuk isu-isu spesifik seperti pemberantasan terorisme. Mengingat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2019-2020, Indonesia ingin berbuat lebih banyak dalam mewujudkan perdamaian dunia.

“Kita perlu mewaspadai beragam upaya penyebaran sel-sel teror baru maupun penguatan paham radikalisme teror, termasuk melalui dunia digital dan juga kembalinya mereka yang terindikasi menjadi *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*. Indonesia tegas mengutuk segala jenis kekerasan atas dasar agama apapun, termasuk seperti yang dilakukan ISIS dan kelompok radikal serta ekstrim lainnya. Kami meyakini bahwa agama manapun termasuk Islam, selalu memajukan penguatan hubungan antar manusia dalam situasi yang mengedepankan perdamaian,” pungkask Bamsuet.

Selain Ketua HDP AS David Price, turut hadir juga Wakil Ketua HDP AS Vern Buchanan, Anggota Kongres Susan Davis, Anggota Kongres Gerry Connolly, Anggota Kongres Neal Dunn, Anggota Kongres John Rutherford, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan. Sedangkan Bamsuet didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana Mukti. ■ alw/sf



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama civitas akademika Universitas Negeri Semarang. Foto: Odjie/OD

Agus Hermanto Dikukuhkan Sebagai Profesor Ilmu Administrasi Publik

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam pengukuhan yang digelar di Auditorium Prof. Wuryanto Unnes itu, Agus menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Manajemen Kebijakan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia”.

Agus menjelaskan, untuk mewujudkan kedaulatan energi di masa depan, Indonesia harus beralih dari energi fosil menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2018, bauran energi Indonesia berasal dari berbagai sumber, dengan porsi minyak menyumbang 37 persen, gas 21,2 persen, batu bara 33,4 persen, dan energi baru terbarukan hanya 8,4 persen.

“DPR dan Pemerintah telah merevisi Undang-undang (UU) tentang Panas Bumi Nomor 27 tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 yang telah mengatur pemanfaatan Panas Bumi untuk kepentingan bersama,” kata politisi Partai Demokrat ini dalam pidato pengukuhan dirinya menjadi profesor, di Kampus Unnes, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (24/7).

Agus menjelaskan beberapa perubahan substansi dari UU Nomor

27 Tahun 2003 jo. UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yaitu: menghilangkan istilah pertambangan dalam kegiatan Panas Bumi dan diganti menjadi perusahaan Panas Bumi, sehingga memperbolehkan perusahaan Panas Bumi pada hutan konservasi.

Kemudian, kewenangan Menteri dalam penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Selanjutnya, proses Survei Pendahuluan Perusahaan Panas Bumi yang dapat dilaksanakan dengan 2 alternatif, yaitu survei pendahuluan atau survei pendahuluan dan eksplorasi (pemboran).

Perubahan berikutnya, pengaturan bonus produksi yang didasarkan pada presentase pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi. Dan terakhir, mekanisme penugasan langsung kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan BUMN untuk mendapatkan Wilayah Kerja (WK) Panas Bumi.

Terlihat hadir Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menristekdikti M Nasir, Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta jajarannya. ■ oji/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindyia, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alayudrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldi Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

BAKTI Diharapkan Fokus Kembangkan Infrastruktur Telekomunikasi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) fokus mengembangkan infrastruktur telekomunikasi tanah air serta memperkuat ekosistem digital. Sebagaimana diketahui, tugas BAKTI adalah penyedia infrastruktur dan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat yang didanai dari kontribusi KPU/USO penyelenggara telekomunikasi.

“Tidak dapat dipungkiri, sejalan dengan perkembangan TIK, maka pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Dengan dukungan infrastruktur TIK termasuk telekomunikasi, akan mendorong daya saing di berbagai sektor termasuk pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujar Hanafi

dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat (26/7).

Legislator Fraksi PAN itu menuturkan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI ingin mengetahui informasi terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk pengembangan sektor pariwisata dan UMKM.

Khususnya melalui program-program yang dijalankan oleh BAKTI, seperti Palapa Ring, akses internet, *Base Transceiver Station* (BTS) dan lain-lain.

“Sehingga dari hasil pertemuan ini, nantinya akan kami gunakan sebagai bahan rujukan dan evaluasi bersama dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah,” imbuh Hanafi dalam rapat bersama BAKTI, PT. Telkom, serta jajaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais. Foto: Tiara/Od

Sebelumnya, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) BAKTI Danny Januar memaparkan BAKTI merupakan badan layanan umum di bawah Kemenkominfo yang melakukan penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK di seluruh wilayah Indonesia. “Sejak 2017 kami difokuskan untuk membangun daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” jelas Danny. ■ tra/es

Komisi II Jaring Masukan di Kepri

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau, guna mendengar masukan maupun informasi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kepri. Sejumlah permasalahan pun menjadi pembahasan dalam diskusi Tim Kunker dengan Pemprov Kepri.

“Potensi Kepri sebagai daerah kepulauan harus dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sinergi semua pihak sangat penting, sehingga setiap kebijakan dan regulasi berjalan maksimal dan merata, agar Kepri semakin maju dan masyarakatnya sejahtera,” kata Herman saat pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Plt. Gubernur Kepri beserta jajarannya di Tanjung Pinang, Kepri, Sabtu (27/7).



Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron memimpin Kunker Komisi II DPR RI ke Kepri. Foto: Eka/Od

Dalam kesempatan itu, jajaran Pemprov Kepri sangat berharap agar RUU Daerah Kepulauan segera rampung. Hal lain yang turut dibahas pada pertemuan ini adalah Pemilu 2019 lalu. “Komisi II DPR sangat mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu beserta aparat Kepolisian dan TNI yang mana di Kepri dapat berjalan sesuai harapan, berjalan dengan baik dan lancar,” apresiasi politisi Partai

Demokrat itu.

Selain itu, beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan ini antara lain; penyelenggaraan pemerintahan reformasi dan birokrasi, pelayanan publik, evaluasi rekrutmen CPNS 2019 dan tenaga honorer, pengelolaan arsip daerah, pengembangan kompetensi SDM, penyelesaian program E-KTP, pengelolaan daerah perbatasan, serta persiapan Pilkada 2020. ■ hr/sf



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kajati NTT. Foto: Sofyan/Od

Komisi III Dorong Kejati NTT Tegakkan Hukum Secara Profesional

Komisi III DPR RI mendorong Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tetap melaksanakan penegakan hukum secara profesional. Kinerja Kejati NTT dalam memecahkan berbagai perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga menetapkan tersangka tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Namun di sisi lain, Kejati NTT harus terbuka dalam penanganan perkara, khususnya terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik, sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan, pihaknya juga menyoroti perkara-perkara mengendap di Kejati NTT yang menarik perhatian publik. Menurutnya ada beberapa kemungkinan perkara itu kemudian *man Krak*, dan belum terselesaikan hingga kini. Diantaranya

karena kasus tidak tertangani, atau tidak cukup alat bukti. Ia menegaskan, Kejati NTT harus berani mengungkap hal ini kepada publik. Jika tidak ada alat bukti, Kejati NTT harus terbuka bahwa kasus tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup menemukan alat bukti.

“Saya tegaskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, jangan takut bila ada intervensi. Yang penting, lakukan penegakan hukum, lidik dan sidik sebuah perkara secara profesional. Kalau dalam melakukan lidik dan sidik tidak cukup buktinya, diungkap saja bahwa tidak bisa menetapkan tersangka. Kalau tidak dilakukan itu, publik bisa menghakimi orang yang belum tentu bersalah,” tegas Herman saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kajati NTT beserta Kajari se-NTT, di Kupang, NTT, Jumat (26/7).

Politisi PDI-Perjuangan itu berpesanan, berbagai perkara yang *man Krak* itu

harus segera diselesaikan oleh Kejati NTT. Namun ia mengingatkan, Kejati NTT harus tetap berlaku profesional. Herman berharap, dengan sikap profesional yang ditunjukkan oleh Kejati NTT, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Sementara terkait berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi Kejati NTT, Herman berkomitmen untuk menindaklanjutinya dalam Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung.

“Apa yang disampaikan Kajati NTT, seperti kekurangan tenaga, gedung dan infrastruktur, dan sarana prasarana yang ada akan kami tindaklanjuti dalam rapat dengan Kejagung. Tapi permasalahan itu memang cerita lama. Kemampuan negara untuk membiayai itu semua, termasuk kebutuhan Aparat Penegak Hukum (APH) yang ideal memang terbatas. Tapi kalau menunggu anggaran ideal, baru penegakan hukum dijalankan, kapan negara ini bisa baik? Jadi apa yang ada jalankan dulu, sambil kita melihat ke depan. Semoga kemampuan negara bertambah,” tutup legislator dapil NTT II itu.

Sebelumnya, Kajati NTT Fathor Rahman memaparkan, institusi yang ia pimpin menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya minimnya Sumber Daya Manusia, kurangnya sarpras, hingga masih kurang idealnya jumlah jaksa. Ia menuturkan, dengan wilayah NTT yang berupa kepulauan dan cukup luas, Kejati NTT hanya memiliki 503 pegawai, yang terdiri dari 177 jaksa dan 326 pegawai tata usaha.

Fathor menambahkan, pada Januari hingga Juni 2019, pada bidang tindak pidana umum, Kejati NTT telah menerima 1.231 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian 45 SP3, dilimpahkan sebanyak 941 perkara, dieksekusi 401 perkara, dan 712 upaya hukum. Sementara untuk perkara bidang tindak pidana umum yang cukup menarik perhatian diantaranya kasus perkara Pemilu, pencabulan dan pemerkosaan pada anak yang mencapai 152 perkara, *human trafficking*, peredaran narkoba, hingga perkara tanah. ■ sf



Tim Kunker Komisi IV DPR RI menyaksikan ekspor perdana ikan tuna di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Foto: Ayu/Od

Komisi IV Apresiasi Ekspor Perdana di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Waittimena mengapresiasi berlangsungnya ekspor Perdana ikan tuna di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Sebagai putra Maluku, ia merasa gembira dan bangga melihat hal yang selama ini didambakan masyarakat Ambon saat ini akhirnya bisa terwujud.

“Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon selama ini merupakan pelabuhan penumpang untuk naik dan turun manusia, tapi sekarang bisa digunakan langsung untuk ekspor ikan tuna ke mancanegara (Thailand),” ujar Michael saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI menyaksikan secara langsung

proses ekspor perdana Ikan Tuna di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Maluku, Selasa (30/7).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa selama ini yang bisa melakukan ekspor hanya pelabuhan-pelabuhan tertentu seperti Surabaya dan Jakarta. Namun saat ini Ambon diperbolehkan untuk melakukan ekspor langsung, maka nelayan dan pengusaha bisa melakukan ekspor langsung melalui pelabuhan Yos Sudarso, Ambon ini tanpa harus melewati Jakarta atau Surabaya.

“Hal ini menjadi sebuah preseden yang baik dan harus terus dikembangkan ke depannya, terlebih lagi dengan potensi yang dimiliki perairan laut Maluku. Sebagaimana

diketahui, wilayah Maluku sendiri 92,4 persennya merupakan laut, dan 7,6 persen darat, tentu tidak hanya ikan dan kepiting saja yang bisa diekspor melalui pelabuhan ini. Tetapi juga berbagai potensi atau sumber daya laut lain yang ada di dalamnya” paparnya.

Legislator dapil Papua Barat itu juga berharap dibukanya ekspor secara langsung dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor itu sendiri. Jika hari ini baru 25 ton ikan tuna yang di ekspor ke Thailand. Ke depan harus bisa lebih besar lagi dan bukan saja ke Thailand tetapi juga Jepang dan Amerika Serikat, serta negara-negara yang menjadi destinasi ekspor sumber daya laut lainnya. ■ ayu/es

Komisi III Apresiasi Kegiatan Lapas Perempuan Kelas II Semarang

Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Usai meninjau sejumlah titik di Lapas ini, Erma menilai berbagai kegiatan yang dilaksanakan warga binaan sangat bermanfaat, salah satunya kegiatan kerajinan.

“Ada yang membuat dengan warna alam, membuat kerajinan bantal, menjahit *goodie bag*, *mempacking cotton bud* dan banyak lagi,” ungkap Erma usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI meninjau Lapas Perempuan Kelas II



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani meninjau Lapas Perempuan Kelas II Semarang. Foto: Runi/Od

Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/7).

Tidak hanya itu, politisi Partai Demokrat ini memberikan pesan kepada sejumlah warga binaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif di dalam lapas. dan jika nanti sudah keluar jangan kembali lagi ke lapas. “Jangan kembali lagi ke lapas. Jika sudah keluar lakukan kegiatan positif di luar sana,” pesan legislator dapil Kalimantan Barat itu.

Adapun produk unggulan yang dihasilkan warga binaan berupa batik warna alam, kain batik, bantal, kerajinan kotak pensil, bunga dari kain flanel, sandal jepit lukis, hingga *goodie bag*. Diketahui, sebanyak 338 orang warga binaan itu terjerat sejumlah kasus, diantaranya kasus pembunuhan, penganiyayan, penculikan, pencurian, korupsi, dan kasus narkoba yang mencapai 75 persen. ■ rni/sf

Bulog Didorong Miliki Wewenang Sebagai Badan Pangan Nasional

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mendesak Pemerintah agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) dapat ditambahkan wewenangnya sebagai lembaga seperti Badan Pangan Nasional, yang dinilai akan memperkuat tingkat ketahanan pangan dalam negeri. Untuk itu, tegas Edhy, Komisi IV DPR RI akan terus memperjuangkan agar hal tersebut sampai dilaksanakan oleh Pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Demikian disampaikan Edhy saat memimpin peninjauan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Karya Baru Perum BULOG yang didampingi oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Perum Bulog Bagya Mulyanto serta jajaran lembaga terkait lainnya, di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/7).

“Sebenarnya kalau memang pemerintah mau serius, yang paling penting adalah amanat Undang-Undang Pangan harus diterapkan. Jikalau tidak mau menyulap Bulog menjadi operator sekaligus regulator, maka seharusnya pemerintah yang menjadi regulator tetap. Adapun caranya, bisa dengan cara Bulog sebagai operator yang maju paling depan untuk berkomunikasi dengan pihak swasta dan *stakeholder* lainnya,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut Edhy menjelaskan, dirinya mengimbau Pemerintah untuk lebih meningkatkan peran kontrol terhadap komoditas primer di dalam negeri. Sehingga, sambung Edhy, komoditas primer tidak hanya dikuasai pihak tertentu. “Komisi IV mendesak Pemerintah untuk lebih aktif meningkatkan peran kontrolnya terhadap komoditas primer. Jangan sampai

komoditas primer nasional dikuasai pihak-pihak tertentu,” pesan Edhy.

Selain itu, mengenai impor, Edhy menjelaskan dirinya mempersilahkan pengusaha di Indonesia untuk melakukan impor. Namun, dengan catatan impor tersebut dilakukan dengan seimbang. Dengan demikian, menurut legislator dapil Sumsel ini, pada saat itulah tercipta kontrol *check and balance* yang seimbang.

“Pengusaha yang selama ini mau melakukan impor silahkan saja, selama itu seimbang,” pungkas Edhy. ■ pun/sf



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Foto: Puntho/Od



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono memimpin Tim Kunjuran Komisi IV DPR RI meninjau BBIPPH Sumbar di Kota Padang. Foto: Agung/Od

Komisi IV Dukung BBIPPH Sumbar Tingkatkan Kualitas

Komisi IV DPR RI mendukung kinerja Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura (BBIPPH) Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemberian edukasi kepada pelajar dan masyarakat mengenai budi daya tanaman pangan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengatakan upaya yang dilakukan balai benih ini harus dikembangkan, karena potensi Indonesia yang sangat luar biasa.

“Ini adalah peluang kita untuk bisa produksi yang begitu banyak jenis tanaman pangan untuk dapat diekspor sebagai upaya wujudkan kedaulatan pangan dan memiliki daya saing, sehingga dapat mengekspor

pangan ke luar negeri,” katanya saat memimpin Tim Kunjuran Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau BBIPPH Sumbar di Kota Padang, Sumbar, Selasa (30/7).

Politisi Partai Golkar itu menyambut baik Kementerian Pertanian yang telah melakukan langkah-langkah tepat untuk menumbuhkan kegiatan pengembangan tanaman hortikultura mulai dari hulu sampai hilir. “Komisi IV mendorong kepada Pemerintah daerah untuk memanfaatkan tiap jengkal tanah untuk mengembangkan tanaman hortikultura,” tegasnya.

Selain itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hasanuddin menambahkan penyebab terhambatnya perdagangan ekspor produk hortikultura Indonesia ke luar negeri karena terlalu banyak

pestisida. “Kalau sayur mayur kita organik, dia (dikirim ke luar negeri) akan diterima. Tapi kalau pestisidanya lebih banyak daripada organiknya, mereka tidak akan terima. Jadi, kuncinya kembali ke organik,” ujar politisi PPP itu.

Sementara itu, kepala UPTD BBIPPH Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar Elviana Anwar menjelaskan balai benih pertanian ini bertugas menyiapkan benih sumber yaitu benih dasar dan benih pokok yang selanjutnya akan diperbanyak oleh penangkar yang akan digunakan oleh petani. Sejak tahun 2015 dijadikan sebagai tempat wisata dan diresmikan oleh Gubernur Sumbar yang didukung oleh SKPD.

Dalam kesempatan kunjungan Komisi IV DPR RI ini, Elviana mengungkapkan berbagai masalah dan tantangan mengenai keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran. “Mudah-mudahan BBI ini diperhatikan, bukan hanya di Sumatera Barat tetapi juga BBI lain di seluruh Indonesia, karena di sinilah sumber benih dan sumber kehidupan. Kalau kita mendukung sumber benih Insya Allah kehidupan kita akan berjalan dengan baik serta mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya. ■ as/sf

Bangun MNP, Komisi VI Minta Pelindo IV dan BUMN Bersinergi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azman Natawijana mendorong Pelindo IV bersinergi dengan sesama perusahaan BUMN untuk memenuhi kebutuhan fasilitas peralatan pelabuhan. Salah satunya adalah menjaga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengembangan Makassar New Port (MNP) tahap selanjutnya.

“Kami dorong utamakan penggunaan produksi dalam negeri. Sebetulnya sinergi ini yang dari dulu kita dorong,” papar Azman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat Pelindo IV, yang dilanjutkan peninjauan lapangan ke Makassar New Port, Sulsel, Selasa (30/7).

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, optimalisasi TKDN

diperlukan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa. Dalam hal ini, Pelindo IV bisa optimalisasi komponen produksi dalam negeri seperti fabrikasi pembangunan *crane* oleh PT. Batara Indonesia di lingkungan pelabuhan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang mengatakan pihaknya siap untuk menjalin sinergi guna meningkatkan komponen produksi dalam negeri minimal 40 persen. Kendati demikian, ia berharap biaya komponen buatan dalam negeri mampu bersaing dengan produksi luar.

“Seharusnya harga TKDN bisa kompetitif. Tapi prinsipnya, kami siap bersinergi selama itu penugasan, kami siap laksanakan. Namun, selama itu bukan penugasan, maka mekanisme pasar yang berlaku. Karena kami juga harus hitung *cost* produksi,” jelasnya.

Pertengahan Maret lalu, Pelindo IV kembali mendatangkan 8 unit *refurbished* Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane di MNP. Sebanyak 8 unit *crane* tersebut merupakan bagian dari batch I, menyusul batch II sebanyak 8 unit Crane lagi. Adapun sumber pendanaan MNP Tahap I menggunakan anggaran dari hasil penjualan obligasi yang dikeluarkan Pelindo IV.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), MNP diharapkan dapat menjadi infrastruktur pendukung utama dan hub di Indonesia Timur. Pengembangan MNP sendiri dibagi dalam beberapa tahapan hingga tahun 2032. Jika rampung, MNP diproyeksikan akan memiliki dermaga total sepanjang 2.184 meter luas lapangan penumpukan 106 Ha dengan total kapasitas mencapai 5 juta TEUs per tahun. ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azman Natawijana memimpin tinjauan ke Makassar New Port, Sulsel. Foto: Anne/Od

Komisi VI Nilai KEK Mandalika Minim Promosi



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat. Foto: Hanum/Od

Pemerintah telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi KEK Pariwisata. Pembangunan KEK Mandalika hingga kini terus berjalan, apalagi dengan adanya rencana penyelenggaraan ajang balap motor dunia MotoGP 2021 di kawasan Mandalika. Namun Anggota Komisi VI DPR RI Erwin TPL Tobing menilai KEK Mandalika masih minim akan promosi.

“Mengingat tahun 2021 sebentar lagi, harusnya sudah menggebu-gebu untuk melakukan promosi agar dapat menarik banyak investor di KEK Mandalika,” ucap Erwin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (29/7).

Di samping itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan,

”

MASYARAKAT SETEMPAT WAJIB DIBERIKAN PELATIHAN DALAM MENERIMA PARA WISATAWAN DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI EKONOMI YANG DIPEROLEH DARI PERHELATAN MOTOGP.

keberadaan KEK Mandalika saat ini sudah berkembang dibandingkan sebelumnya. Terdapat, tujuh hotel yang sudah beroperasi dan beberapa hotel maupun resort yang masih dalam proses pembangunan di kawasan Mandalika.

Erwin menilai kuliner dapat menjadi salah satu penarik para investor. “Tidak hanya melihat alam maupun budaya yang dapat menarik minat investor, di sini (Nusa Tenggara Barat) kan terkenal juga dengan kulinernya. Nah dari sini bagaimana kita bisa membuat ini, sehingga kuliner dapat menjadi salah satu penarik wisatawan maupun investor,” jelasnya.

Oleh karenanya, masyarakat setempat wajib diberikan pelatihan dalam menerima para wisatawan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang diperoleh dari perhelatan MotoGP. “Dibutuhkan juga koordinasi antar lembaga maupun instansi terkait dalam menarik investor untuk berinvestasi di Mandalika,” tutup legislator dapil Kalimantan Barat itu.

■ hnm/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus. Foto: Azka/Od

Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus mendapatkan temuan bahwa PT. Pertamina menghadapi kendala dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), seperti di Provinsi Maluku. Di Maluku banyak daerah yang sulit dijangkau, dan tidak bisa menggunakan jalur darat. Kendala lainnya, karena Maluku merupakan daerah kepulauan,

Pertamina Hadapi Kendala Pendistribusian BBM di Daerah 3T

cuaca menjadi mudah berubah-ubah dan gelombang laut tinggi.

Hal itu diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Pegadaian Ambon, Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina, perwakilan Kementerian Perdagangan, perwakilan Kantor Pinjaman Kredit Penanaman Modal (PKPM) di Ambon, Maluku, Senin (29/6).

“Kita harus *kasih* kesempatan, kita harus *kasih* kewenangan kepada pemerintah karena memang rintangan permasalahannya cukup banyak. Apalagi kalau bicara masalah provinsi yang kepulauan, mulai dari transportasi, kemudian juga mulai dari alam, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Kita juga perlu *kasih* kesempatan kepada Pertamina,” ujar legislator daerah pemilihan Jambi ini.

Di sisi lain, Ihsan menilai pendistribusian BBM satu harga untuk daerah 3T sudah mulai merata, dan sudah mulai dilakukan. Pemerataan BBM Satu Harga ini merupakan tugas dari pemerintah untuk 124 titik daerah 3T, dengan 11 titik di Maluku. Ia berharap agar pemerataan distribusi BBM Satu Harga bisa secepatnya merata, agar masyarakat yang tinggal di daerah 3T bisa merasakan harga yang merata.

Selain itu, masyarakat di daerah 3T tidak terbebani dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. “Pertamina harus optimistis bisa menjalankan program ini dengan baik dan mencapai target pelaksanaan BBM Satu Harga di 124 titik wilayah Indonesia. Dengan demikian, banyak masyarakat yang merasakan dampak dari BBM Satu Harga yang dijual sesuai ketetapan oleh pemerintah,” harap Ihsan. ■ azk/sf

Kendalikan Kerusakan Lingkungan dengan Kontrol Perizinan

Berdasarkan catatan laporan statistik lingkungan hidup Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta pada tahun 2015/2016, dalam kurun waktu empat tahun (2011-2014) kerusakan lingkungan di DI Yogyakarta mengalami kenaikan hingga 250 persen.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan tersebut dapat dilakukan tindakan antisipasi dan pencegahan melalui sistem kontrol perizinan.

“Bahkan parahnya, dari 94 kasus lingkungan di Yogyakarta yang dicatat oleh organisasi lingkungan hidup WALHI, tak satupun yang terselesaikan dengan tuntas,” tandas Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke DI Yogyakarta,

Senin (29/7).

Selain itu Ridwan juga menyampaikan, pengubahan status fungsi hutan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menuai polemik dalam masyarakat. Kawasan seluas 6410 hektar itu dinilai membatasi ruang dan akses masyarakat baik ekonomi, kultural, maupun sosial.

“Masyarakat mengeluhkan keberadaan TNGM yang membatasi sumber penghidupan mereka. Sebagai contoh di daerah Bantul, penambangan batu di area perbukitan di Bantul makin marak. Aktivitas ini mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dikatakannya, selain merusak lingkungan, teknik penambangan yang salah dapat menyebabkan longsor. Hal ini bukan tanpa bukti, sebab di

Kecamatan Piyungan, Yogyakarta, sudah terjadi longsor bukit batu yang disebabkan aktivitas penambangan.

“Bukan hanya penambangan batu saja yang marak di Bantul, tetapi juga penambangan pasir yang sangat mengancam lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dampak buruk telah menanti jika keberadaan penambangan pasir di sepanjang Sungai Progo dibiarkan,” pungkasnya. ■ dep/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Dep/Od

Penambangan di Kalsel Harus Bijak

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta aktivitas penambangan di Kalimantan Selatan harus dilakukan dengan bijak, khususnya aktivitas penambangan batu bara yang menjadi sumber energi kelistrikan utama di PLTU Asam Asam, Kabupaten Tanah Laut. Masalah lingkungan adalah masalah yang cukup mengemuka dan mendapat sorotan dari masyarakat. Diketahui, Kalsel adalah salah satu provinsi yang menghadapi masalah lingkungan yang cukup berat akibat eksploitasi sumber daya alam.

“Meskipun eksploitasi sumber daya alam itu telah berhasil menggerakkan perekonomian daerah, namun harus dikelola dengan bijak dan cermat. Karena sumber daya alam adalah bukan untuk generasi sekarang semata, tetapi untuk generasi berikutnya,” ujar Gus Irawan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Asam Asam di Tanah Laut, Kalsel, Senin (29/7). Sungai Martapura dan Sungai Barito menjadi salah satu contoh akibat adanya aktivitas penambangan.

Kualitas air sungainya semakin buruk akibat pencemaran logam berat maupun oleh bakteri E.coli. Tingkat kekeruhan yang tinggi saat penghujan dan kadar garam melebihi baku mutu saat kemarau karena intrusi air laut. “Kerusakan dan penurunan kualitas air di Kalimantan Selatan salah satunya akibat kegiatan pertambangan yang masif. Sebanyak 41 persen hutan Meratus dan hutan lainnya di Kalsel, dibebani izin tambang. Di dalam kawasan hutan tersebut terdapat sungai-sungai ribuan kilometer panjangnya,” tutur Gus Irawan.

Namun politisi Partai Gerindra itu juga memandang perhatian Pemprov Kalsel juga cukup tanggap, sejak

tahun 2019 telah mencabut 595 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi syarat *Clean and Clear* (CnC) untuk beroperasi dan telah habis perizinannya dari 789 IUP yang ada, sehingga jumlah IUP tersisa tinggal 194 IUP. Lahan bekas tambang yang sudah dicabut ini akan dijadikan kawasan cadangan tambang nasional, yang mana apabila akan kembali ditambang harus melalui mekanisme lelang.

Namun menurut Gus Irawan, Pemprov Kalsel juga memprioritaskan untuk pengembangan kawasan wisata dan pertanian. Kelistrikan di Kalimantan Selatan, lanjut politisi asal Sumatera Utara ini, masih menyisakan masalah yaitu sering terjadi pemadaman. Pemadaman ini bukan karena kurangnya daya listrik tetapi belum memadainya jaringan transmisi.

Jaringan interkoneksi untuk Kalimantan diperkirakan akan selesai tahun 2020.

Data PLN Kalsel dan Kalimantan Tengah menunjukkan, daya listrik yang tersedia untuk dua provinsi bertetangga itu antara lain pada PLTA Riam Kanan di Banjar dengan daya 3X10 megawatt (MW), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sektor Barito, dan PLTU Asam-Asam di Tanah Laut sebanyak empat unit masing-masing dengan daya 65 MW. Adapun PLTU Asam Asam unit 5 dan 6 yang berkapasitas 2X100 MW diresmikan pengerjaannya pada 9 Desember 2017 lalu. Pengerjaan unit ini sebagai perwujudan dari program 35.000 MW.

“Komisi VII DPR RI telah melihat secara langsung PLTU Asam Asam Unit 5 dan 6 yang berdiri di atas lahan seluas 16,5 hektar. Pembangunan PLTU, telah dicanangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2016-2025, menggunakan teknologi Boiler Pulverized Coal, yang diharapkan handal memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara efektif,” tandas Gus Irawan. ■ hs/sf



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Asam Asam di Tanah Laut, Kalsel. Foto: Hendra/Od



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berdialog dengan DP3A Maros, Sulsel. Foto: Jaka/Od

Anggaran Terbatas, DP3A Maros Diminta Kreatif Cari Dana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros memiliki kreatifitas mencari dana. Pasalnya, Pemerintah memotong anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekitar 52 persen atau sekitar Rp 257 miliar dari pagu anggaran tahun 2019 lalu.

“Komisi VIII dengan tegas menolak pemotongan anggaran tersebut, diperlukan Kementerian PPPA membicarakan langsung dengan Presiden. Untuk itu, saya meminta agar Pemerintah Daerah kreatif dan inovasi dalam mencari dana bantuan. Seperti yang dilakukan salah satu situs

penggalangan dana ‘Kitabisa.com’, banyak orang yang ikut tersentuh dan akhirnya menyumbang untuk kesulitan orang lain,” kata Iskan usai pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan DP3A Maros, Sulsel, Jumat (26/7).

Ia menambahkan, pengalaman para pekerja sosial, jika benar-benar jujur dan melayani, *Insya Allah* dana itu akan datang sendiri. Tapi hal ini harus disampaikan ke publik, jangan takut menyampaikan kebaikan. “Saya yakin, apalagi perusahaan yang memiliki dana CSR (Corporate Social Responsibility), banyak yang mau membantu korban kekerasan anak maupun perempuan. Jangan terlalu mengharapkan APBN, terkadang prosesnya lama, terkadang kita sudah tidak menjabat, anggarannya belum juga cair,” ujarnya.

Legislator dapil Sumut ini menyayangkan pemotongan anggaran di Kementerian PPPA, padahal permasalahan anak semakin banyak. Belum lama ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan anak-anak yang sudah kecanduan *game online* itu sebagai penyakit gangguan mental. Tentu, hal ini menjadi tugas baru para pekerja sosial.

“Saya ambil contoh di kota-kota besar, ada seorang anak tiba-tiba menjerit sehabis main *game online*, disangka ada pembunuhan, ternyata tidak. Saya meminta kepada para pekerja sosial tetap inovatif, *InsyaAllah* rezekinya banyak,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas DP3A Maros, Muhammad Idrus, mengatakan beberapa hambatan dalam bekerja antara lain, belum ada rumah singgah di Dinas Sosial Maros, dana operasional terbatas, serta tidak adanya dana visum di P2TP2A atau DP3A.

“Kami sering mengalami penanganan kasus kekerasan perempuan yang membutuhkan visum, sementara anggaran di Kepolisian juga terbatas, maka kami sering menggunakan biaya pribadi,” pungkasnya. ■jk/es

Pembangunan Sumber Energi Harus Perhatikan Lingkungan

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah. Untuk itu diperlukan pasokan sumber energi listrik yang memadai untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengingatkan agar pembangunan sumber energi itu tetap memperhatikan lingkungan.

“Perusahaan harus memperhatikan pengelolaan limbah, agar tidak mencemari lingkungan. Kalau ketahuan akan kita tindak tegas,” tegas Nasir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Palembang, Sumsel, Senin (29/7). Nasir menambahkan, Kunker ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dari Komisi VII DPR RI kepada mitra kerja,

sekaligus memastikan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiarto, perwakilan Kementerian ESDM, perwakilan Kementerian LHK, perwakilan Kemenristekdikti, Kepala Dinas ESDM se-Sumsel, perwakilan Direksi PT. Pertamina, Komite BPH Migas, Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Direksi PT. OKI Pulp And Paper Milles, Dirut PT. Semen Baturaja, dan Dirut PT. Pupuk Sriwijaya, dan mitra kerja terkait lainnya.

Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiarto menyampaikan, kondisi kelistrikan di Sumsel, saat ini daya mampu PLN berada di angka 1.933 megawatt, sedangkan beban kelistrikan sebesar 907 megawatt. Sehingga di Sumsel terdapat *reserve margin* 53 persen. “Dengan kondisi



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir.
Foto: Surya/Od

ini, artinya kondisi kelistrikan di Sumsel dalam posisi sangat cukup, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi di provinsi ini,” jelas Wiluyo.

Sementara General Manager PT. PLN unit induk wilayah S2JB Daryono menyatakan adanya opsi tenaga surya. “Kita usulkan 29 desa melalui Kementerian ESDM menggunakan listrik tenaga surya, kemudian akan kita gantikan menggunakan listrik PLN secara bertahap jadi saat ini kita gunakan listrik tenaga surya lebih dahulu,” papar Daryono. ■ soe/sf



Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna.
Foto: Kresno/Od

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menilai beras yang diserap untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan beras milik Bulog. Menurutnya BPNT selalu menyerap beras daerah setempat, sehingga sesuai dengan lidah lokal. Ia kembali mengingatkan, dulu beras untuk program BPNT tidak disuplai lagi oleh Bulog, karena kualitas beras Bulog dianggap tidak layak.

“Setelah kita jadikan BPNT dan

Beras BPNT Dinilai Lebih Bagus Dibandingkan Bulog

menyerap beras daerah setempat, maka berasnya itu tidak hanya layak, namun jauh lebih baik. Saya lihat di beberapa tempat, masyarakat menyatakan BPNT hebat,” ujar Muna usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gedung Aula Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (26/7).

Menurutnya ada kendala saat ini bahwa Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso tidak setuju dengan perpindahan penyaluran beras sejahtera (Rastra) dari Bulog ke BPNT. Muna menilai jika Rastra mau dikembalikan ke Bulog lagi, maka mekanismenya harus diubah. Penyerapan beras daerah setempat

dianggap tetap lebih bagus, karena sesuai dengan lidah lokal.

Di sisi lain, politisi Partai NasDem juga menyinggung masalah kompetensi pendamping PKH yang perlu dievaluasi oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, para pendamping PKH perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menaikkan taraf hidup para penerima PKH.

“Pendamping PKH tidak hanya membagikan *job description* saja, itu tidak akan ada kemajuan dari penerima PKH. Mereka harus mendapatkan diklat untuk membimbing para penerima PKH agar bisa menaikkan taraf hidupnya. Para penerima PKH bisa diajak menabung, lalu dicarikan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dengan sesama para penerima PKH,” pungkas Muna. ■ eno/sf

Komisi IX Soroti Pengelolaan Limbah Medis RS



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Foto: Gerald/Od

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menegaskan, masalah pengelolaan limbah rumah sakit menjadi sorotan dan fokus perhatian Komisi IX DPR RI. Pasalnya, hingga kini belum ada titik temu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Kesehatan terkait pengelolaan limbah medis ini. Kemenkes meminta agar setiap RS boleh mengelola limbahnya sendiri, tetapi KLHK sampai sekarang belum mengizinkan.

“Jadi harus dikolektif. Tapi apa yang terjadi, belum tentu juga rumah sakit sanggup memiliki *incinerator*, sehingga biasanya mereka menitipkan kepada rumah sakit yang besar. Nah

ini yang masih belum terjadi titik temu. Sehingga kami sepakat nanti kita coba akan dorong ini untuk harus dibentuk panitia kerja (panja) limbah medis,” ucap Dede saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (26/7)

Menurut politisi Partai Demokrat ini, ia meminta kebijakan dari KLHK untuk menanggulangi pengelolaan limbah medis ini, agar tidak menularnya penyakit akibat dari limbah medis ini. Selain itu ia meminta kepada KLHK untuk memberikan kewenangan kepada Kemenkes atau kepada RS dan puskesmas di seluruh Indonesia untuk mengelola limbahnya secara mandiri.

“Sebab rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia hampir semuanya

sudah mempunyai *incinerator* dengan biaya besar dulunya, Tapi dengan peraturan baru dengan KLHK, hal itu tidak boleh dilakukan, harus pengusaha besar. Ini perlu dipertanyakan dan nanti kami berencana untuk membuat panja limbah medis ini,” tandar legislator dapil Jawa Barat itu.

Kunker ini turut dihadiri sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya, Sumarjati Arjoso (F-Gerindra), Suir Syam (F-Gerindra), Ali Mahir (F-NasDem), Nurmansyah E Tanjung (F-PDI Perjuangan), Ansori Siregar (F-PKS), Betti Shadiq (F-Golkar), Muhammad Iqbal (F-PPP), Elva Hartati (F-PDI Perjuangan), Bambang Riyanto (F-Gerindra), dan Handayani (F-PKB). ■ *opi/sf*

Komisi IX Soroti Tingginya Kasus *Stunting* di Kalteng

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) perlu mendapat perhatian penuh dalam masalah *stunting*. Pasalnya, kasus *stunting* di sejumlah daerah di Kalteng masih cukup tinggi, bahkan kasus *stunting* di Kalteng merupakan yang terburuk ke-empat di Indonesia. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mengharapkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalteng beserta jajarannya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng dan dihadiri Kemenkes, Kemenaker, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPOM di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kalteng, Jumat (26/7).

“Tim Kunker Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan dalam kunjungan kali ini membahas sejumlah isu, diantaranya *stunting*, angka kematian ibu dan anak, serta masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” imbuh Dewi kepada awak media.

Menurut politisi Partai Golkar ini, prevalensi *stunting* yang cukup tinggi di Kalteng merupakan masalah yang serius untuk diperhatikan. Mengingat mulai tahun depan era yang dikedepankan di Indonesia adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penanganan masalah *stunting*, lanjut Dewi, dimulai dari ibu hamil kemudian kesehatan bayi dan anak. Masalah *stunting* bukan hanya tanggung jawab Kemenkes, tapi juga kementerian lain dan pemerintah daerah. Ada sekitar

7-8 Kementerian yang disinergikan untuk memberantas *stunting* ini, untuk menurunkan angkanya bahkan meniadakannya.

“Jika ditemukan kasus-kasus *stunting*, harus segera ditindaklanjuti lintas Kementerian. Terkait kondisi sosial-ekonomi misalnya, bisa didorong untuk memperoleh bantuan Kemensos,” tandas legislator daerah pemilihan Jawa Barat IV ini.

Gubernur Kalteng dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Permasalahan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Yuel Tenggara menyampaikan, pihaknya berharap dengan adanya kunjungan ini bisa memberikan dampak positif terkait penanganan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas di Kalteng ke depan. ■ oji/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara bertukar cenderamata dengan Pemprov Kalteng. Foto: Odjie/Od

Komisi IX Apresiasi Pemprov Sumut Kurangi Pengangguran



Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau BLK Medan. Foto: Singgih/Od

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi pengangguran di wilayahnya, kendati tingkat pengangguran di Sumut masih cukup tinggi. Ia berharap dalam waktu dekat ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Sumut.

“Kita berharap dalam waktu dekat ini ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalam meningkatkan investasi yang bisa masuk di Sumatera Utara. Dengan demikian (investasi itu) bisa menampung tenaga kerja,” ungkap Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Medan, Sumut, Sabtu (27/7).

Saleh memaparkan, jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Sumut sebanyak 6,365 juta jiwa. Lebih dari sepertiga penduduk berusia 15 tahun ke atas sebanyak 38,50 persen bekerja menjadi buruh, karyawan atau pegawai. Kemudian 19,80 persen berusaha sendiri, berusaha dan dibantu buruh tidak tetap sebesar 15,16 persen, serta 3,50 persen dilaporkan menjadi pengusaha dengan mempekerjakan buruh tetap atau karyawan.

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sumut bekerja di sektor pertanian (perkebunan, kehutanan dan perikanan) atau sebanyak 37,52 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,16 persen, jasa kemasyarakatan, sosial perorangan sebesar 18,38 persen, sektor industri hanya 9,02 persen. Sisanya bekerja pada sektor pertambangan, kelistrikan, konstruksi, air minum, bangunan,

angkutan, komunikasi serta sektor keuangan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus terus melakukan inovasi dan pengembangan program di bidang ketenagakerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai wujud implementasi program prioritas Pemerintah dalam menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga tahun 2019,” ungkap Saleh.

Lebih lanjut, politisi PAN itu menyampaikan peran penting Balai Latihan Kerja (BLK) guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Sumut yang masih didominasi tingkat pendidikan SMA sebanyak 33,46 persen, SMP 18,69 persen, dan SD 31,43 persen. “BLK memiliki peran penting di dalam menciptakan SDM yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan dunia kerja saat ini,” ujar Saleh.

Legislator dapil Sumut ini juga menyampaikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang masih terus dilakukan dari Sumut, paling banyak ke Malaysia dan kerap mengalami masalah ketika ada pemulangan TKI yang dari Malaysia. Ia menjelaskan, para TKI itu pulang dari Malaysia dan mendarat di Sumut. Atau juga mereka berlabuh di Sumut untuk pulang ke daerahnya masing-masing.

“Mereka kekurangan biaya untuk mengatasi persoalan pemulangan tenaga karena dari daerah-daerah lain, katakanlah seperti dari NTB, Madura dan sebagainya itu justru mendarat di Medan. Dan ini perlu dana yang cukup untuk memulangkan mereka ke daerahnya masing-masing. Ini menjadi kendala yang harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” ujarnya. ■ skr/sf



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Medan, Sumatera Utara. Foto: Riyani/Od

Ekraf Sumut Harus Ditata

Provinsi Sumatera Utara dikaruniai alam yang indah menjadi lumbung destinasi pariwisata baru di Indonesia, apalagi setelah Pemerintah menetapkan Danau Toba menjadi salah satu destinasi baru atau 10 Bali baru. Upaya menyulap “New Bali” tersebut harusnya sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk menyiapkan ekonomi kreatif (ekraf) di sekitar tempat wisata itu. Masyarakat pun harus dipersiapkan untuk menghadapi kehadiran wisatawan.

“Akses langsung ke Danau Toba sudah dibuka, namun untuk mempromosikan sebuah destinasi harus diikuti oleh produk. Salah satu produknya yaitu bagaimana keramahan daerah dan hidupnya kuliner, kriya dan fesyen. Oleh karenanya, kami terus mendorong masyarakat sekitar harus dibekali kemampuan mengemas produk

dengan baik,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Medan, Sumut, Jumat (26/7).

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, dengan masyarakat dibekali pelatihan-pelatihan untuk mengemas produk olahan dengan baik, diharapkan akan meningkatkan dan menarik wisatawan yang akan datang ke Danau Toba. Hal tersebut juga berdampak naiknya jumlah wisatawan dan devisa negara. Apalagi pemerintah juga menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 ini.

“Setelah wisatawan meningkat dampaknya juga perekonomian warga sekitar tempat wisata membaik dan akan membuka lapangan kerja baru. Tinggal Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sering memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk

kriya, kuliner dan fesyen,” tutur legislator dapil Jambi ini.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan) menilai produk kuliner di Sumut sudah sangat bagus dan menarik, tinggal yang diperhatikan dari aspek higienis makanan yang perlu dijaga. “Kuliner di Medan hanya ada dua yaitu enak dan enak sekali. Tentu dalam hal ini yang perlu diperhatikan untuk makanan tradisional kita ini adalah meningkatkan kualitasnya dari segi kebersihan,” tutur Sofyan.

Legislator dapil Sumut I tersebut menilai banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Medan memiliki rasa yang enak, namun harus diperhatikan kebersihan tempat makanan serta kualitas makanannya. “Saya yakin ekonomi kreatif di Medan bisa maju, kita harus mencontoh penataan kawasan kuliner di Penang, Malaysia yang ditata dengan baik,” tutup Sofyan. ■ rh/sf

PPDB Sistem Zonasi Tinggalkan Berbagai Permasalahan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudjian mengatakan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi. Tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil pantauan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke SMA Negeri 9 Manado dan SMKN 3 Manado, ditemukan permasalahan pelajar berprestasi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut.

“Komisi X meminta masukan, supaya kita bisa menyempurnakan dan membenahi kembali sistem zonasi yang memang sudah bagus niatnya, namun dalam pelaksanaannya betul-betul harus memperhatikan kondisi daerah,” jelas Hetifah saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau

beberapa sekolah di Manado, Sulut, Sabtu (27/7).

Dari hasil peninjauan, diketahui dampak dari penerapan PPDB sistem zonasi ada sekolah yang menambah ruang kelas guna menampung keluhan orang tua murid. Misalnya di SMAN 9 Manado, jumlah pendaftar mencapai 2000 orang, sedangkan kuota yang diterima hanya 300 murid. Akhirnya sekolah menambah ruang kelas baru, itupun hanya bisa menampung menjadi 600 murid. Temuan ini yang mesti diselesaikan dalam penerapan sistem zonasi ini.

Di sisi lain, politisi partai Golkar ini menjelaskan, jumlah guru PNS yang memasuki masa pensiun kian banyak. Sehingga terjadi kekurangan guru PNS hampir di semua provinsi. Hal ini imbas dari diberlakukannya moratorium penerimaan guru oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Dari penjelasan Mendikbud, jumlah guru PNS sudah cukup, namun penyebarannya masih belum merata ke semua wilayah Negara Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulut Edison Humiang merasa bersyukur Komisi X DPR RI bisa melihat langsung kondisi pendidikan di Sulut dan bisa melihat permasalahan yang dialami Pemprov Sulut, khususnya terkait PPDB sistem zonasi.

“Memang dalam penerimaan siswa baru terjadi penumpukan hanya di beberapa sekolah saja, khususnya di Kota Manado dan fasilitas sarpras serta guru tidak dapat menunjang akibat kekurangan itu. Ini menjadi PR bagi Pemprov untuk mengatasi permasalahan itu,” kata Humiang.

■ man/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudjian memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau beberapa sekolah di Manado, Sulut. Foto: Andri/Od

Pemkab Ogan Ilir Belum Miliki RIPPDA

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan hingga kini belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA), padahal itu menjadi syarat untuk mendapatkan anggaran pariwisata. Untuk itu, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana mengungkapkan perlu adanya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menghambat disalurkan anggarannya ke daerah itu.

“Pemda harus segera melakukan koordinasi dari daerah ke pusat, sehingga aturan-aturan dari pusat juga dapat dijalankan di daerah,” tegas

Meli, sapaan akrabnya, saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI ke Ogan Ilir, Sumsel, Jumat (26/7). Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih ini guna mengetahui pelaksanaan-pelaksanaan peraturan di tingkat kabupaten/kota.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemda adalah terkait luasnya daerah. “Oleh karena itu, Komisi X berharap agar Pemda tidak menunggu informasi disampaikan oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemda dapat berinisiatif untuk jemput bola dan mencari informasi kepada wakil rakyat,” ujar Meli.

Meli kembali menegaskan penting untuk selalu berkoordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. “Ke depannya, kunjungan ke daerah-daerah hingga tingkat kabupaten seperti ini



Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana. Foto: Larissa/Od

menjadi penting. Jangan hanya sampai pada tingkat provinsi saja. Sehingga antara rakyat dan wakil rakyat dapat terhubung dengan baik, dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lebih efisien,” pesan legislator dapil Sumsel II itu. ■ ica/sf



Tim Kunker Komisi XI DPR RI bertukar cenderamata dengan Pemprov Lampung. Foto: Huseni/Od

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tak Menekan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang pada semester I tahun 2019 mencapai 5,18 persen ternyata tidak menekan angka kemiskinan. Faktornya, karena pertumbuhan yang ada tak menyentuh ekonomi masyarakat banyak terutama sektor pertanian.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Marwan Cik Asan mengemukakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Bandar Lampung, Senin (29/7). Angka kemiskinan di Provinsi Lampung saat ini 13 persen, turun dari sebelumnya 14 persen. Namun, secara nasional angka kemiskinan di Lampung masih terbelakang.

“Meski pertumbuhan ekonominya tinggi, kadang di atas nasional, faktanya tidak menurunkan kemiskinan. Ternyata pertumbuhan ekonomi Lampung tidak menyentuh masyarakat banyak, yaitu ke sektor pertanian,” papar politisi Partai Demokrat itu.

Pertumbuhan di Lampung ternyata banyak dipicu sektor perdagangan dan konstruksi. Dengan sudah terungkapnya peta perekonomian Lampung, mestinya Pemerintah Provinsi Lampung langsung memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian. Dengan langkah itu diharapkan angka kemiskinan bisa ditekan secara signifikan.

“Dengan pemetaan yang semakin jelas ini, Pemerintah Provinsi Lampung didukung pemerintah pusat harus memfokuskan program-program pembangunannya pada sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menurunkan angka kemiskinan,” tutup legislator dapil Lampung I ini. ■ mh/es

Legislator Minta PSBI Jangkau Kegiatan *Off Farm*



Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI meninjau perkebunan Gapoktan Mitra Arjuna, Malang. Foto: Erman/Od

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menganjurkan Bank Indonesia (BI) ketika menjalankan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) tidak melulu fokus pada kegiatan pertanian (*on farm*) saja, namun juga menasar pada kegiatan yang *off farm* seperti upaya menjadikan produk pertanian semenarik mungkin sehingga laris di pasaran.

“PSBI bukan hanya *on farm* saja, tetapi juga *off farm*. Seperti masalah *packaging* bagaimana dibuat semenarik mungkin, juga pangsa pasarnya harus dipikirkan dalam PSBI,” kata Soepriyatno saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI meninjau perkebunan milik Gabungan

Kelompok Tani (Gapoktan) Mitra Arjuna yang menerima manfaat PSBI di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (29/7).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan selama ini program yang digagas Bank Indonesia itu sudah banyak memberikan manfaat bagi Gapoktan. Di Jawa Timur sendiri, selain petani bawang merah dan bawang putih, PSBI juga sudah menasar kepada petani kopi. Dimana, saat ini tren konsumsi kopi di penjuru dunia sedang meningkat.

“Di Jatim, banyak penghasil hortikultura seperti bawang merah, bawang putih. Sekarang kopi sudah mulai mendunia. Kita disini tidak hanya menghasilkan kopi jenis *robusta* saja, melainkan juga jenis *arabica*. Ini

”

DI JATIM, BANYAK PENGHASIL HORTIKULTURA SEPERTI BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH. SEKARANG KOPI SUDAH MULAI MENDUNIA.

kesempatan kita mendukung petani dengan aktivitas *off farm*, agar produksi petani kita dapat diekspor ke penjuru dunia,” tandas politisi dapil Jawa Timur II itu.

Secara keseluruhan, lanjut Soepriyatno, Komisi XI DPR RI mendorong agar Bank Indonesia senantiasa mengembangkan program kemasyarakatan seperti PSBI agar dapat diterapkan ke daerah-daerah lainnya sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gapoktan Mitra Arjuna Luki Budiarti menceritakan bahwa pihak Bank Indonesia melalui PSBI sudah membina Gapoktan Mitra Arjuna sejak tahun 2011. Tidak hanya menjadi mitra dalam bercocok tanam, Gapoktan Mitra Arjuna juga diajarkan untuk membentuk kelembagaan yang kuat.

“Sejak dibimbing oleh BI melalui PSBI, kami merasa petani itu bukanlah pengemis yang meminta-minta bantuan, namun kami menunjukkan bahwa kami bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah. Kami sudah mengantongi izin PIRT (Produksi Izin Rumah Tangga pangan) hingga sertifikat halal. Bahkan produksi kentang kami sudah diekspor oleh BI ke Singapura,” pungkas Luki. ■es

Pemindahan Ibu Kota Harus Aktif Libatkan Masyarakat

Gagasan mengenai pemindahan ibu kota pada akhirnya telah dikerucutkan dalam studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan. Tentu bukan hanya kebutuhan fisik dari suatu daerah tersebut yang menjadi pertimbangan, melainkan juga kebutuhan non-fisik seperti melibatkan sumber daya manusia harus menjadi pertimbangan utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jenö usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (29/7). Ia menyampaikan, masyarakat wajib dilibatkan aktif dalam upaya mewujudkan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan tersebut.

“Kalau jadi ini harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, juga memberikan manfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Bappenas juga sudah menyampaikan bahwa mereka telah membuat hitung hitungan *multiplier effect* daripada pemindahan ibu kota negara kalau dipindahkan ke Kalimantan dampaknya akan seperti apa,” ujar politisi yang akrab disapa Jenö ini.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa kesiapan fisik untuk Kalteng dalam menunjang perpindahan 1,6 juta penduduk masih sangat memadai. Dalam studi Bappenas dibutuhkan 40 ribu hektar luas tanah untuk memindahkan jumlah penduduk tersebut, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sebesar 15 juta hektar.

“Kalau dari kesiapan fisik, segi kebutuhan lahan, kita lihat rencana yang dibuat Bappenas sampai sejauh ini kan

studinya butuh sekitar 40 ribu hektar. Untuk memindahkan kurang lebih 1,6 juta penduduk. 40 ribu hektar tentu kalau kita bandingkan luas kalteng yg 15 juta hektar tentu secara ketersediaan lahan itu ada,” sebut Jenö.

Ibu kota yang baru menurut politisi dapil Kalimantan Barat ini harus bisa merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang besar yang tentunya harus ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu Jenö meminta secara khusus agar sektor SDM ini diperkuat sebagai bagian kekuatan nasional.

“Ada hal-hal yang harus dikembangkan tidak hanya kepada industri yang ekstraktif atau berbasis SDA. Untuk itu ya secara tidak langsung SDM-nya harus dipersiapkan. Menyiapkan SDM tentu kita tak bicara setahun atau dua tahun saja, ada dimensi waktu yang panjang yang harus ditempuh, sehingga ini harus menjadi catatan kita,” tukasnya.

Kunker Reses ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, diantaranya Eva Kusuma Sundari (PDI-Perjuangan), I.G.A Rai Wijaya (PDI-Perjuangan), Tutik Kusuma Wardhani (F-Demokrat), Sukiman (F-PAN), Amirul Tamim (F-PPP), dan Muhammad Nur Purnamasidi (F-PG). Sejumlah pertemuan pun digelar dengan mitra kerja. ■ er/sf



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dipimpin Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jenö ke Provinsi Kalimantan Tengah. Foto: Erlangga/Od



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso. Foto: Phunto/Od

Setjen dan BK Harus Adaptif Hadapi Dinamika Perubahan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi

Santoso menjelaskan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selaku *supporting system* Dewan, harus selalu proaktif dan adaptif dengan cepat melihat serta mengantisipasi dinamika perubahan untuk menyajikan yang terbaik terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan.

Demikian pesan Agung kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen dan BK DPR RI yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan

BK DPR RI dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/7).

“Jadi, karena begitu cepat sekali dinamika perubahannya di DPR ini tentunya Setjen dan BK sebagai *supporting system* daripada Pimpinan dan Anggota Dewan juga harus fleksibel. Hal yang paling utama, jika ada berbagai perubahan maka teman-teman kesekjenan harus langsung bisa dengan cepat menyesuaikan diri, itu yang penting,” ujar Agung.

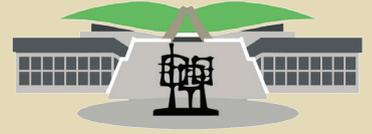
Selain itu, sambung legislator Fraksi Partai Demokrat ini, setiap PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II ini diharapkan menjadi pemimpin yang semakin memiliki cara pandang lebih luas cakupannya di

dalam memberikan *support* kepada DPR RI sebagai lembaga.

“Saya harapkan, beliau-beliau yang dididik oleh Diklat Kepemimpinan ini ke depannya menjadi lebih luas cara pandangnya di dalam memberikan *support* kepada DPR RI sebagai lembaga,” tandasnya usai acara sembari mengatakan seorang pemimpin haruslah memiliki sifat dasar *Sidiq, Amanah, Tabliq* dan *Fathonah*.

Agung menegaskan, sifat-sifat dasar tersebut harus dipegang teguh oleh setiap PNS yang turut serta dalam Diklat Kepemimpinan ini. Namun tidak hanya itu, ia juga menambahkan, setiap peserta juga harus memiliki sifat disiplin serta kemauan yang kuat untuk terus mengembangkan dirinya dalam menghadapi tuntutan zaman sebagai seorang pemimpin.

“Saya berpesan, setiap peserta dalam Diklat ini harus memiliki sifat dasar *Sidiq, Amanah, Tabliq* dan *Fathonah*. Itulah sifat dasar seorang pemimpin. Saya juga menambahkan tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan serta kemauan untuk terus meng-*upgrade* dirinya. Sehingga, ke depannya lebih mudah untuk mengikuti dinamika perubahan yang begitu cepat di DPR RI,” pungkas legislator dapil Jawa Barat itu. ■ pun/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka Seminar Nasional *Road Map* Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu (31/7).
Foto: Oji/HR



Komisi I DPR RI (kiri) dan Komisi II DPR RI (kanan) menerima kunjungan delegasi *House Democratic Partnership* (HDP) Kongres Amerika Serikat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). Foto: Arief & Gerald/HR



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha saat pelepasan pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7). Foto: Jaka/HR

